



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

TINJAUAN KEBIJAKAN MONETER

MEI 2026







PRAKATA

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kestabilan nilai Rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang terefleksi dalam inflasi yang stabil, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Target inflasi tahun 2026 ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, yaitu sebesar $2,5 \pm 1\%$. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, melalui upaya mencapai inflasi yang rendah dan stabil, nilai tukar yang stabil, serta cadangan devisa negara yang cukup. Sesuai dengan bidang tugasnya, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan moneter,

makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah.

Tinjauan Kebijakan Moneter (TKM) dipublikasikan oleh Bank Indonesia secara periodik setelah Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Agustus, September, November, dan Desember. Tinjauan ini dimaksudkan sebagai media bagi Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas mengenai evaluasi kondisi moneter terkini atas asesmen dan prakiraan perekonomian Indonesia, serta respons kebijakan moneter Bank Indonesia. Secara lebih rinci, dalam publikasi TKM disampaikan hasil evaluasi atas dinamika perekonomian global dan domestik terkini, serta respons kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia.



Dewan Gubernur

PERRY WARJIYO
Gubernur

DESTRY DAMAYANTI
Deputi Gubernur Senior

AIDA S. BUDIMAN
Deputi Gubernur

FILIANINGSIH HENDARTA
Deputi Gubernur

RICKY PERDANA GOZALI
Deputi Gubernur

THOMAS A.M. DJIWANDONO
Deputi Gubernur



Daftar Isi

<u>PRAKATA</u>	<u>iii</u>	<u>1. Perekonomian Global dan Domestik</u>	<u>3</u>
<u>Dewan Gubernur</u>	<u>iii</u>	<u>2. Prospek Perekonomian</u>	<u>7</u>
<u>Daftar Isi</u>	<u>iv</u>	<u>3. Respons Kebijakan Bank Indonesia</u>	<u>9</u>
<u>Ringkasan Eksekutif</u>	<u>1</u>		

Ringkasan Eksekutif

Tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah memperburuk kondisi dan prospek perekonomian dunia. Penutupan Selat Hormuz mengakibatkan melonjak tingginya harga minyak dunia. Terganggunya produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan antarnegara juga mendorong kenaikan pada harga komoditas dunia lainnya. Perkembangan ini menyebabkan prospek pertumbuhan dunia lebih rendah dan tekanan inflasi global meningkat. Respons kebijakan moneter global menjadi lebih ketat, bahkan sejumlah bank sentral mulai menaikkan kebijakan suku bunganya. Suku bunga kebijakan moneter AS, Fed Funds Rate (FFR), diperkirakan tidak akan turun hingga akhir 2026, sementara imbal hasil (*yield*) US Treasury tenor 10 dan 2 tahun terus naik. Di pasar keuangan global, memburuknya kondisi global tersebut mendorong berlanjutnya pelarian modal keluar dari berbagai negara, termasuk negara *Emerging Markets*, ke aset yang memberikan imbal hasil tinggi dan aman (*safe-haven assets*), khususnya obligasi AS. Perkembangan ini juga mendorong kuatnya Indeks dolar AS dan menimbulkan tekanan pelemahan baik terhadap mata uang negara maju (DXY) maupun mata uang negara berkembang (ADXY).

Di dalam negeri, momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus dipertahankan. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,39% (yoy) pada triwulan IV 2025 menjadi 5,61% (yoy) pada triwulan I 2026, ditopang oleh permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga meningkat didorong kenaikan mobilitas masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan dampak positif berbagai stimulus Pemerintah.

Konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi didorong belanja program prioritas Pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG), serta peningkatan belanja pegawai melalui gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR). Investasi khususnya investasi bangunan meningkat dipengaruhi oleh Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Sementara itu, ekspor turun dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) perlu terus diperkuat di tengah memburuknya perekonomian dan pasar keuangan global. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan berbagai instrumen untuk menghadapi memburuknya gejolak global, di tengah tingginya permintaan musiman valas domestik. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) terjaga rendah dan ke depan perlu terus dikendalikan dari dampak memburuknya gejolak global agar tetap berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2026 dan 2027. Penguatan kebijakan moneter Bank Indonesia terus ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, terkendalinya inflasi dalam sasaran, dan memperkuat stabilitas perekonomian. Jumlah uang beredar tumbuh lebih tinggi sejalan dengan kebijakan ekspansi likuiditas moneter yang ditempuh Bank Indonesia. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas.

Peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu terus diperkuat. Ketahanan perbankan tetap kuat untuk memitigasi risiko dampak dari perang di Timur Tengah. Pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada April 2026 tetap tinggi didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat.

Prospek perekonomian global diperkirakan lebih rendah dengan tekanan inflasi global yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2026 diperkirakan akan lebih rendah menjadi sebesar 3,0% dan tekanan inflasi global meningkat menjadi sekitar 4,3%. Terdapat kemungkinan FFR akan naik pada 2027 dengan inflasi AS yang masih tinggi. Imbal hasil (*yield*) US Treasury tenor 10 dan 2 tahun diperkirakan lebih tinggi didorong oleh defisit fiskal AS yang membesar.

Prospek ekonomi domestik tetap baik ditopang oleh optimalisasi belanja Pemerintah yang bersinergi dengan bauran kebijakan Bank Indonesia termasuk pelonggaran kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran untuk turut mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 diperkirakan berada dalam kisaran 4,9–5,7%. Dari eksternal, Bank Indonesia memprakirakan defisit transaksi berjalan 2026 dalam kisaran defisit 1,3% sampai dengan 0,5% dari PDB. Bank Indonesia meyakini nilai tukar Rupiah akan stabil dan cenderung menguat, didukung oleh komitmen Bank Indonesia, imbal hasil yang menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Prospek inflasi IHK tahun 2026 dan 2027 tetap dalam kisaran 2,5±1%, meskipun ke depan tingginya harga minyak dan kenaikan harga komoditas lainnya akibat gejolak global dapat berdampak pada kenaikan harga-harga dan tekanan inflasi di dalam negeri. Pertumbuhan uang beredar akan terus dikelola sehingga tetap konsisten menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah. Dengan perkembangan kredit sampai dengan April 2026, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12%.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 50 bps menjadi 5,25%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 50 bps menjadi 4,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 50 bps menjadi 6,00%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah serta sebagai langkah *pre-emptive* untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan Pemerintah. Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada stabilitas ("*pro-stability*") untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak gejolak global. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ("*pro-growth*"). Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.

BAB 1

Perekonomian Global dan Domestik

Tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah memperburuk kondisi perekonomian dunia. Penutupan Selat Hormuz mengakibatkan melonjak tingginya harga minyak dunia. Terganggunya produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan antarnegara juga mendorong kenaikan pada harga komoditas dunia lainnya. Respons kebijakan moneter global menjadi lebih ketat, bahkan sejumlah bank sentral mulai menaikkan kebijakan suku bunganya. Imbal hasil (*yield*) US Treasury telah naik ke 4,66% (tenor 10 tahun) dan 4,11% (tenor 2 tahun) pada tanggal 19 Mei 2026. Di pasar keuangan global, memburuknya kondisi global tersebut mendorong berlanjutnya pelarian modal keluar dari berbagai negara, termasuk negara *Emerging Markets*, ke aset yang memberikan imbal hasil tinggi dan aman (*safe-haven assets*), khususnya obligasi AS. Perkembangan ini juga mendorong kuatnya indeks dolar AS dan menimbulkan tekanan pelemahan baik terhadap mata uang negara maju (DXY) maupun mata uang negara berkembang (ADXY).

Terus memburuknya prospek perekonomian dan pasar keuangan global mengharuskan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus dipertahankan. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,39% (yoy) pada triwulan IV 2025 menjadi 5,61% (yoy) pada triwulan I 2026, ditopang oleh permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga meningkat didorong kenaikan mobilitas masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan dampak positif berbagai stimulus Pemerintah. Konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi didorong belanja program prioritas Pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG), serta peningkatan belanja pegawai melalui gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR). Investasi khususnya investasi bangunan meningkat dipengaruhi oleh Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Sementara itu, ekspor turun dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi global yang melambat.



Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) perlu terus diperkuat di tengah memburuknya perekonomian dan pasar keuangan global. Surplus neraca perdagangan barang turun dari 7,6 miliar dolar AS pada triwulan IV 2025 menjadi 5,5 miliar dolar AS pada triwulan I 2026. Sementara itu, aliran modal pada triwulan I 2026 tercatat *net outflows* sebesar 0,8 miliar dolar AS. Perkembangan ini perlu direspons dengan penguatan sinergi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia sehingga kinerja neraca pembayaran dapat terus mendukung ketahanan eksternal perekonomian nasional dan sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dalam menghadapi gejolak global akibat perang Timur Tengah. Dari sisi Bank Indonesia, suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dinaikkan menjadi 6,21%; 6,31%; dan 6,45% masing-masing untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan pada tanggal 13 Mei 2026. Berbagai respons kebijakan yang ditempuh dapat mendorong kembali masuknya investasi portofolio asing pada triwulan II 2026 yang mencatatkan *net inflows* sebesar 5,5 miliar dolar AS (hingga 18 Mei 2026), terutama ditopang oleh aliran masuk modal asing ke SRBI dan Surat Berharga Negara (SBN) didorong oleh meningkatnya imbal hasil di kedua instrumen tersebut. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2026 tetap terjaga sebesar 146,2 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan berbagai instrumen untuk menghadapi memburuknya gejolak global, di tengah tingginya permintaan musiman valas domestik. Seperti dikemukakan sebelumnya, gejolak global mengakibatkan pelarian modal keluar dari *Emerging Markets* dan kuatnya dolar AS sehingga memberi tekanan yang besar pada pelemahan nilai tukar hampir semua negara, termasuk nilai tukar Rupiah. Di domestik, permintaan valas pada triwulan II 2026 meningkat cukup tinggi dipengaruhi oleh faktor musiman antara lain untuk pembayaran dividen dan utang luar negeri. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia terus meningkatkan intensitas intervensi valuta asing, baik melalui intervensi di pasar *Non-Deliverable Forward* (NDF) luar negeri (*offshore*) maupun transaksi *spot* dan *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) di pasar dalam negeri. Struktur suku bunga instrumen moneter juga diperkuat dengan kenaikan suku bunga SRBI seperti disebutkan di atas untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing. Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan transaksi pasar valas melalui penyesuaian *threshold* beli tunai valas terhadap Rupiah tanpa *underlying*, peningkatan *threshold* jual DNDF/*Forward*, serta

peningkatan *threshold* beli dan jual *swap*, yang berlaku sejak April 2026. Selain itu, Bank Indonesia memperluas instrumen operasi moneter valuta asing dengan instrumen *spot* dan *swap* dalam valuta *offshore* Chinese Renminbi (CNH) terhadap Rupiah dan perluasan transaksi perdagangan dan investasi menggunakan mata uang lokal (*Local Currency Transaction*, LCT). Nilai tukar Rupiah pada 19 Mei 2026 tercatat sebesar Rp17.700 per dolar AS, atau melemah 2,20% (ptp) dibandingkan dengan level akhir April 2026.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) terjaga rendah. Inflasi IHK pada April 2026 tercatat sebesar 2,42% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 3,48% (yoy). Inflasi inti turun menjadi 2,44% (yoy) didukung konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi. Inflasi kelompok *administered prices* (AP) menurun menjadi 1,53% (yoy) seiring berakhirnya *base effect* dari kebijakan diskon tarif listrik pada 2025 serta minimnya perubahan harga yang diatur Pemerintah. Inflasi kelompok *volatile food* (VF) juga turun menjadi 3,37% (yoy) dipengaruhi oleh berlangsungnya panen raya di daerah sentra produksi dan terjaganya pasokan pangan di berbagai daerah.

Penguatan kebijakan moneter Bank Indonesia terus ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, terkendalinya inflasi dalam sasaran, dan memperkuat stabilitas perekonomian. Seperti dijelaskan di atas, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah terus diperkuat dengan intervensi di pasar *offshore* melalui NDF dan intervensi di pasar domestik melalui pasar *spot*, DNDF, serta pembelian SBN di pasar sekunder, didukung dengan penguatan kebijakan transaksi pasar valas dan perluasan instrumen operasi moneter valas. Kebijakan suku bunga BI-Rate ditempuh agar tetap konsisten dengan upaya untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dan mencapai sasaran inflasi sebesar 2,5±1% pada 2026 dan 2027. Kebijakan ini didukung oleh penguatan strategi struktur suku bunga instrumen operasi moneter dengan kenaikan suku bunga SRBI seperti di atas sebagai bagian dari stabilisasi nilai tukar Rupiah. Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter *pro-market* untuk mendorong peningkatan aliran masuk modal asing ke dalam negeri sehingga mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah. Posisi instrumen moneter SRBI pada 18 Mei 2026 tercatat sebesar Rp921,88 triliun, dengan kepemilikan nonresiden yang meningkat menjadi Rp221,59 triliun (24,04% dari total *outstanding*) sehingga turut mendukung upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, dan sekaligus sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan

kebijakan fiskal, Bank Indonesia juga membeli SBN yang pada 2026 (hingga 19 Mei 2026) mencapai Rp140,57 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp73,28 triliun. Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian dan mempertahankan kredibilitas kebijakan moneter.

Jumlah uang beredar tumbuh lebih tinggi sejalan dengan kebijakan ekspansi likuiditas moneter yang ditempuh Bank Indonesia. Uang primer (M0) pada April 2026 tumbuh sebesar 14,1% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 11,8% (yoy). Dari komponennya, pertumbuhan M0 pada April 2026 terutama dipengaruhi oleh giro bank umum di Bank Indonesia yang tumbuh sebesar 28,4% (yoy) dan uang kartal yang tumbuh meningkat sebesar 14,6% (yoy). Dari faktor yang memengaruhi, pertumbuhan M0 pada April 2026 didorong oleh operasi moneter yang lebih ekspansif serta peningkatan kebutuhan likuiditas perbankan untuk pembayaran dividen. Sejalan dengan itu, uang beredar dalam arti luas (M2) pada Maret 2026 tumbuh sebesar 9,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 8,7% (yoy). Dari faktor yang memengaruhi, pertumbuhan M2 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat dan penyaluran kredit.

Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas. Hingga minggu pertama Mei 2026, insentif KLM yang diperoleh bank tercatat sebesar Rp424,7 triliun dengan alokasi pada *lending channel* sebesar Rp361,0 triliun serta *interest rate channel* sebesar Rp63,7 triliun. Berdasarkan kelompok bank, KLM disalurkan masing-masing kepada bank BUMN sebesar Rp214,2 triliun, BUSN sebesar Rp171,1 triliun, BPD sebesar Rp30,6 triliun, dan KCBA sebesar Rp8,2 triliun. Secara sektoral, KLM telah disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, mencakup sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi, sektor Jasa termasuk Ekonomi Kreatif, sektor Konstruksi, *Real Estate*, dan Perumahan, serta sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan. KLM akan terus diperkuat dengan memberikan insentif bagi bank yang meningkatkan pembiayaan dan pendanaan, termasuk nonkredit dan non-DPK, serta bagi bank yang menetapkan suku bunga kredit/pembiayaan yang sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia.

¹ Pembayaran digital terdiri atas transaksi melalui aplikasi *mobile* dan internet.

Peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu terus diperkuat. Kredit perbankan pada April 2026 tumbuh sebesar 9,98% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 9,49% (yoy). Berdasarkan kelompok penggunaan, perkembangan ini didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang pada April 2026 masing-masing tumbuh sebesar 19,48% (yoy), 6,04% (yoy), dan 6,13% (yoy). Pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12% didukung oleh masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan (*undisbursed loan*) sebesar Rp2.551,42 triliun atau 22,57% dari plafon kredit yang tersedia, serta memadainya kapasitas pembiayaan bank tercermin pada rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 25,39% dan DPK yang masih tumbuh tinggi sebesar 11,39% (yoy) pada April 2026. Efisiensi suku bunga perbankan juga dapat ditingkatkan, dimana pada April 2026 suku bunga kredit tercatat sebesar 8,73% dan suku bunga deposito 1 bulan sebesar 4,16%.

Ketahanan perbankan tetap kuat untuk memitigasi risiko dampak dari perang di Timur Tengah.

Perkembangan ini ditandai dengan likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, dan risiko kredit yang tetap rendah. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan pada Maret 2026 tercatat tinggi sebesar 25,09%, yang tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) perbankan secara agregat tetap rendah sebesar 2,14% (bruto) dan 0,83% (neto) pada Maret 2026. Hasil *stress test* Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk dampak rambatan berlanjutnya perang di Timur Tengah, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga baik. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan makroprudensial dan sinergi kebijakan bersama KSSK dalam rangka turut menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Februari 2026 tetap tinggi didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Volume transaksi pembayaran digital¹ mencapai 5,15 miliar transaksi atau tumbuh 42,86% (yoy) pada April 2026 didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital. Volume transaksi melalui aplikasi *mobile* dan internet masing-masing

tumbuh sebesar 15,92% (yoy) dan 22,95% (yoy), termasuk transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 108,43% (yoy). Kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan *merchant*. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 490 juta transaksi atau tumbuh 46,09% (yoy) dengan nilai transaksi mencapai Rp1.219 triliun pada April 2026. Sementara itu, volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS tercatat sebanyak 0,91 juta transaksi atau tumbuh 25,72% (yoy), dengan nominal transaksi BI-RTGS tumbuh 14,55% (yoy) mencapai Rp17.520 triliun pada April 2026. Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 14,61% (yoy) menjadi Rp1.301 triliun pada April 2026.

Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Infrastruktur yang stabil tercermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia

(SPBI) dan sistem pembayaran industri yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Struktur industri yang sehat tergambar pada interkoneksi antarpelaku dalam sistem pembayaran yang terus menguat dan diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat struktur industri sistem pembayaran, khususnya pada aspek manajemen risiko dan keandalan infrastruktur teknologi pelaku industri, sejalan dengan implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran (PBI PISP). Bank Indonesia juga akan terus memastikan keamanan dan keandalan infrastruktur SPBI, baik ritel maupun *wholesale*, serta infrastruktur sistem pembayaran industri. Bank Indonesia juga terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

BAB 2

Prospek Perekonomian

Prospek perekonomian global diperkirakan lebih rendah dengan tekanan inflasi global yang meningkat. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 diperkirakan akan lebih rendah menjadi sebesar 3,0% dan tekanan inflasi global meningkat menjadi sekitar 4,3%. Respons kebijakan moneter global menjadi lebih ketat, bahkan terdapat kemungkinan suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), Fed Funds Rate (FFR), akan naik pada 2027 dengan inflasi AS yang masih tinggi. Imbal hasil (*yield*) US Treasury diperkirakan naik lebih tinggi didorong oleh defisit fiskal AS yang membesar.

Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik. Prospek tersebut ditopang oleh optimalisasi belanja Pemerintah yang bersinergi dengan bauran kebijakan Bank Indonesia termasuk pelonggaran kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran untuk turut mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 diperkirakan berada dalam kisaran 4,9–5,7%.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) perlu terus diperkuat di tengah perlambatan prospek perekonomian global. Bank Indonesia memprakirakan defisit transaksi berjalan 2026 dalam kisaran defisit 1,3% sampai dengan 0,5% dari PDB. Karenanya, penguatan sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia perlu diperkuat untuk meningkatkan surplus neraca modal dan finansial guna menjaga ketahanan eksternal perekonomian nasional dan sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dalam menghadapi gejolak global.

Bank Indonesia akan terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Bank Indonesia meyakini nilai tukar Rupiah akan stabil dan cenderung menguat, didukung oleh komitmen Bank Indonesia, imbal hasil yang menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik.



Prospek inflasi IHK tahun 2026 dan 2027 tetap dalam kisaran $2,5\pm 1\%$, meskipun dampak kenaikan harga komoditas dunia perlu diantisipasi. Melonjak tingginya harga minyak dan kenaikan harga komoditas lainnya akibat gejolak global dapat berdampak pada kenaikan harga-harga dan tekanan inflasi di dalam negeri. Di samping kenaikan harga-harga impor (*imported inflation*), tekanan inflasi dapat berasal dari kenaikan harga-harga yang diatur Pemerintah (*administered prices*), termasuk kenaikan harga energi nonsubsidi. Karenanya, di samping stabilisasi nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter guna menjaga inflasi tetap terkendali dalam sasaran $2,5\pm 1\%$ pada 2026 dan 2027. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12%. Prospek ini didukung oleh masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan (*undisbursed loan*), memadainya kapasitas pembiayaan bank, dan DPK yang masih tumbuh tinggi. Efisiensi suku bunga perbankan juga dapat ditingkatkan. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kebijakan makroprudensial yang akomodatif antara lain melalui penguatan kebijakan RIM dan KLM untuk terus mendukung penyaluran kredit perbankan. Koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK juga terus diperkuat untuk memperbaiki struktur suku bunga dan mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan tersebut. Selain itu, pertumbuhan uang beredar akan terus dikelola sehingga tetap konsisten menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah.

BAB 3

Respons Kebijakan Bank Indonesia

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 50 bps menjadi 5,25%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 50 bps menjadi 4,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 50 bps menjadi 6,00%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah serta sebagai langkah *pre-emptive* untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ yang ditetapkan Pemerintah. Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada stabilitas ("*pro-stability*") untuk memperkuat ketahanan eksternal

ekonomi Indonesia dari dampak gejolak global. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ("*pro-growth*"). Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.



Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, dengan:
 - i. meningkatkan intensitas intervensi valuta asing untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui transaksi *Non-Deliverable Forward* (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi *spot* dan *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) di pasar domestik;
 - ii. meningkatkan struktur suku bunga instrumen moneter *pro-market* sejalan dengan kenaikan BI-Rate untuk tetap menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik; dan
 - iii. menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan memastikan pertumbuhan Uang Primer lebih dari 10% (*double digit*) sesuai dengan ekspansi moneter, termasuk melalui transaksi Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.
2. Memperkuat pelonggaran kebijakan makroprudensial untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas dan mendorong intermediasi perbankan, termasuk dari aspek pembiayaan (*financing*) non-kredit maupun pendanaan (*funding*) non-DPK, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan melalui:
 - i. pelonggaran kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) melalui perluasan cakupan dan penguatan kriteria surat berharga/surat berharga syariah korporasi yang dimiliki dan diterbitkan oleh bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM, yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2026;
 - ii. peningkatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan memberikan tambahan insentif paling tinggi sebesar 0,5% dari DPK untuk bank yang memenuhi nilai RIM sesuai dengan rentang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia namun belum memanfaatkan insentif maksimum KLM sebesar 5,5%, yang berlaku efektif mulai 1 Agustus 2026;
 - iii. penguatan sinergi lebih lanjut dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk mendorong kredit/pembiayaan tinggi baik dari sisi penawaran perbankan maupun permintaan dunia usaha melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI); dan
 - iv. publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM.
3. Memperkuat implementasi langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran sesuai dengan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 untuk semakin memperluas kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif melalui:
 - i. perluasan program QRIS Jelajah Indonesia 2026 dengan target *merchant* QRIS sebanyak 47 juta pada 2026 guna meningkatkan aktivitas ekonomi keuangan digital yang inklusif, termasuk UMKM;
 - ii. pelaksanaan QRIS Antarnegara Indonesia – Tiongkok sebagai upaya perluasan konektivitas pembayaran digital lintas negara setelah kesuksesan konektivitas QRIS dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan; dan
 - iii. penyelenggaraan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI): Digdaya dan Hackathon melalui program pelatihan tingkat lanjutan untuk semakin memperluas penciptaan kewirausahaan dan usaha digital inklusif (*digital business entrepreneurship*) baik di bidang jasa keuangan, UMKM, maupun layanan umum sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan perluasan lapangan kerja.
4. Memperkuat kebijakan transaksi pasar valas melalui implementasi penurunan *threshold* tunai beli valas terhadap Rupiah tanpa *underlying* menjadi USD25.000 per pelaku per bulan yang mulai berlaku Juni 2026, guna mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah dan pendalaman pasar keuangan domestik.
5. Mempercepat implementasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai dengan *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2030 untuk mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah melalui:
 - i. perluasan lebih lanjut transaksi dalam valuta *offshore* Chinese Renminbi (CNH) terhadap Rupiah dengan instrumen *spot* dan *swap* di pasar valas domestik sejalan dengan semakin meluasnya penggunaan

- mata uang lokal (*Local Currency Transaction, LCT*) untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi;
- ii. perluasan keikutsertaan perbankan dalam transaksi *offshore* NDF jual valas terhadap Rupiah di pasar luar negeri bagi Dealer Utama PUVA yang memenuhi persyaratan dari Bank Indonesia.
6. Memperkuat pengawasan terhadap bank dan korporasi dengan aktivitas pembelian dolar AS yang tinggi melalui koordinasi erat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 7. Memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta memfasilitasi penyelenggaraan

promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.

Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal untuk memitigasi dampak ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah terhadap perekonomian domestik sehingga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga baik. Sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga dipererat untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan bagi program Asta Cita Pemerintah.

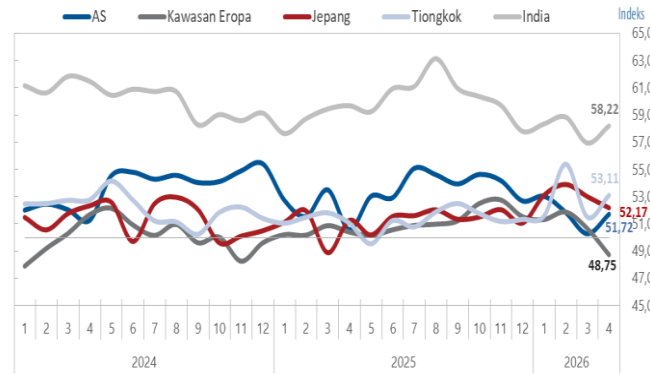
Tingginya gejala global akibat perang di Timur Tengah memperburuk kondisi dan prospek perekonomian dunia.

Pertumbuhan PDB Dunia

Negara	2022	2023	2024	2025	2026*
Dunia	3,5	3,3	3,3	3,4	3,0
Negara Maju	2,6	1,7	1,8	1,9	1,7
Amerika Serikat	1,9	2,9	2,8	2,1	2,3
Kawasan Eropa	3,4	0,4	0,9	1,4	0,9
Jepang	1,0	1,5	0,1	1,2	0,7
Negara Berkembang	4,1	4,4	4,3	4,4	3,9
Tiongkok	3,0	5,2	5,0	5,0	4,5
India	6,8	7,7	6,5	7,6	6,5
ASEAN-5	5,5	4,0	4,6	4,5	4,0
Amerika Latin	4,2	2,4	2,4	2,4	2,4
Negara Berkembang Eropa	1,2	3,3	3,4	2,0	2,1
Timur Tengah & Asia Tengah	5,4	2,0	2,4	3,6	2,6

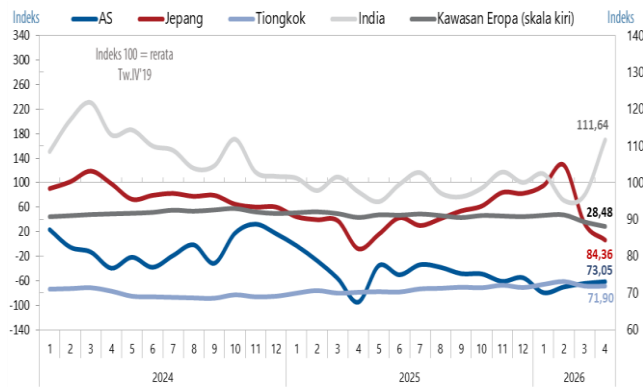
Sumber: IMF WEO. *Proyeksi Bank Indonesia

PMI Global



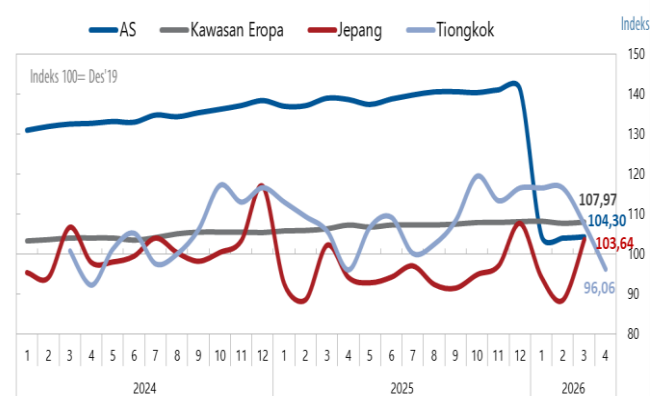
Sumber: IHS Markit, Bloomberg (Tiongkok)

Indeks Keyakinan Konsumen



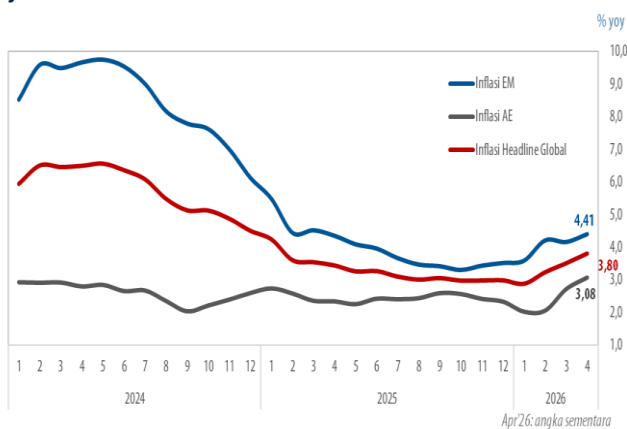
Sumber: Bloomberg, diolah

Penjualan Eceran Global



Sumber: CEIC, diolah

Inflasi Global



Sumber: Bloomberg dan IMF, diolah

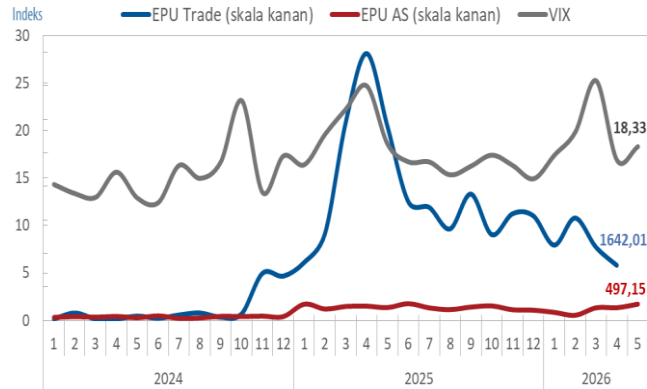
Harga Komoditas Ekspor Indonesia

KOMODITAS	2024				2025				2026				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2*	YTD*		
Tembaga	-4,7	16,8	11,2	12,8	8,8	10,3	-4,3	5,6	19,2	7,5	36,7	39,7	30,4
Batu Bara	-27,7	-16,3	0,2	-11,3	-15,3	-14,4	-16,8	-20,2	-11,5	-15,7	5,2	35,2	20,2
CPO	0,5	6,2	5,2	31,3	10,5	17,1	0,3	6,9	-14,0	1,7	-10,7	11,4	0,3
Karet	17,9	44,3	40,6	40,0	35,3	9,3	-9,2	-7,6	-14,6	-6,0	-0,3	32,8	17,1
Nikel	-35,7	-16,9	-19,9	-7,2	-21,3	-6,2	-17,7	-7,8	-7,1	-10,0	11,1	20,4	16,2
Timah	0,2	25,3	18,5	23,4	16,7	21,0	0,5	7,0	24,8	12,8	52,2	56,0	44,5
Aluminium	-8,2	12,3	10,0	16,9	7,4	17,1	-3,9	8,1	9,3	7,4	21,8	44,2	25,6
Kopi	7,1	19,9	55,9	65,7	36,4	100,7	63,9	36,9	31,0	54,1	-16,7	-19,6	-17,0
Lainnya	-1,0	-0,2	0,3	0,1	-0,2	-0,2	1,1	1,7	0,4	0,7	0,3	0,7	0,5
Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia	-8,2	1,7	6,1	8,7	1,5	2,9	-5,0	-3,5	-4,9	-2,9	3,4	20,1	11,0
Minyak (Brent)**	83	85	80	75	81	76	68	69	64	69	81	117	93

**Minyak dalam USD/barel, komoditas lain (% yoy)

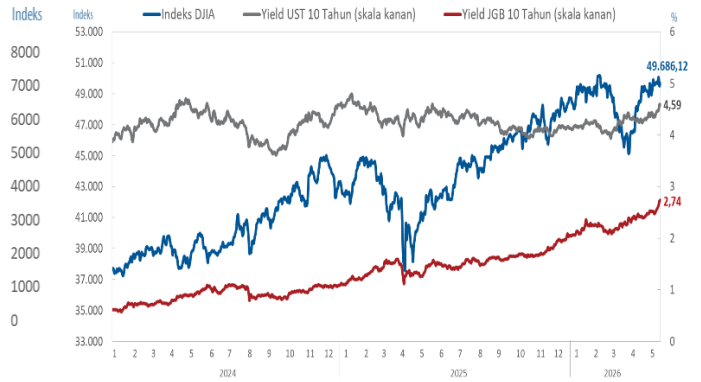
Sumber: Bloomberg. Data s.d. 18 Mei 2026

Indeks Ketidakpastian Global



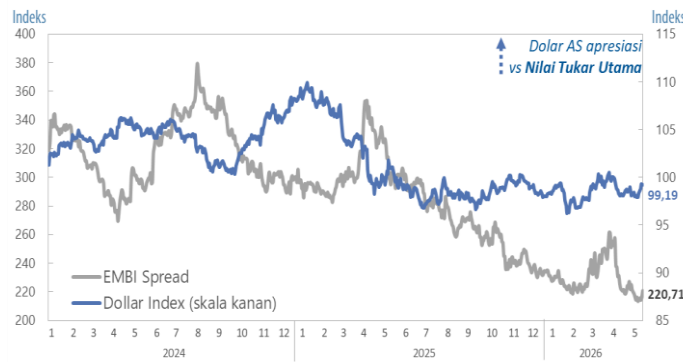
Sumber: Bloomberg. Data s.d. 18 Mei 2026

Yield UST 10Y dan JGB 10Y serta Indeks Saham AS



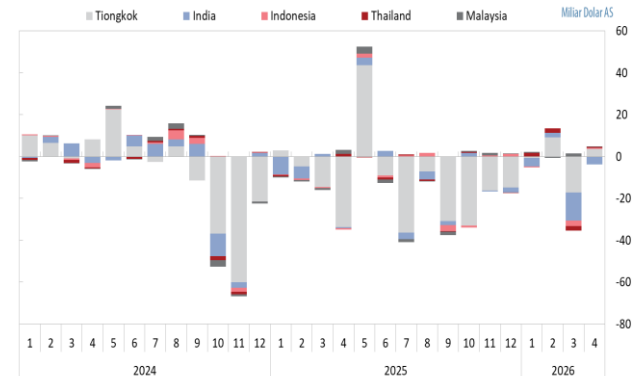
Sumber: Bloomberg. Data s.d. 18 Mei 2026

Kinerja Dolar AS dan Persepsi Risiko Negara Berkembang



Sumber: Bloomberg. Data s.d. 18 Mei 2026

Aliran Modal ke Negara Berkembang



Sumber: IIF, diolah

Momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus dipertahankan.

Pertumbuhan PDB Domestik dan Komponen Berdasarkan Pengeluaran

Komponen	2024				2025				2026		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	2025 I	2026 I	
Konsumsi Rumah Tangga	4,92	4,94	4,92	4,99	4,94	4,95	4,97	4,89	5,11	4,98	5,52
Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga	24,13	9,79	11,46	6,06	12,48	3,07	7,82	3,76	5,90	5,13	6,28
Konsumsi Pemerintah	20,45	2,04	4,63	4,61	6,76	-1,22	-0,32	5,66	4,55	2,50	21,81
Investasi (PMTDB)	3,78	4,42	5,16	5,03	4,61	2,12	6,99	5,04	6,12	5,09	5,96
Investasi Bangunan	5,46	5,31	6,02	5,26	5,51	1,35	4,89	3,02	3,74	3,25	5,29
Investasi Nonbangunan	-0,78	1,97	2,96	4,40	2,23	4,32	12,93	10,34	12,39	10,12	7,85
Ekspor	2,01	8,89	9,73	8,36	7,25	5,91	10,14	9,14	3,25	7,03	0,90
Impor	1,92	8,12	12,60	11,26	8,54	3,57	11,15	0,86	3,96	4,77	7,18
PDB	5,11	5,05	4,95	5,02	5,03	4,87	5,12	5,04	5,39	5,11	5,61

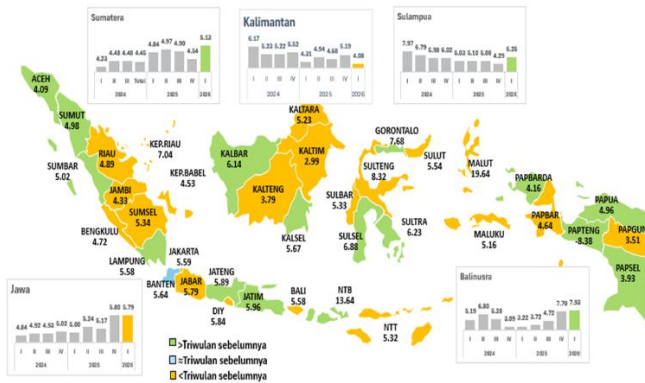
Sumber: BPS

Pertumbuhan PDB Domestik dan Komponen Berdasarkan Lapangan Usaha

Komponen	2024				2025				2026		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	2025 I	2026 I	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-3,54	3,25	1,70	0,72	0,68	10,53	1,66	4,93	5,14	5,33	4,97
Pertambangan dan Penggalian	9,31	3,17	3,46	3,95	4,90	-1,23	2,03	-1,98	-1,31	-0,66	-2,14
Industri Pengolahan	4,13	3,95	4,72	4,89	4,43	4,55	5,68	5,54	5,40	5,30	5,04
Pengadaan Listrik dan Gas	5,35	5,39	5,02	3,42	4,77	5,11	0,90	2,86	3,55	3,10	-0,99
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,44	0,85	0,04	1,06	1,57	0,18	0,82	3,32	-0,51	0,94	0,42
Konstruksi	7,59	7,29	7,48	5,81	7,02	2,18	4,98	4,21	3,89	3,81	5,49
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,58	4,87	4,84	5,23	4,89	5,04	5,38	5,46	6,07	5,49	6,26
Transportasi dan Pergudangan	8,66	9,56	8,64	7,92	8,69	9,01	8,52	8,62	8,98	8,78	8,04
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,34	10,00	8,21	6,47	8,46	5,75	8,18	8,50	7,15	7,41	13,14
Informasi dan Komunikasi	8,41	7,66	6,82	7,45	7,57	7,72	7,92	9,65	8,09	8,35	7,14
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,93	7,90	5,49	1,74	4,74	3,98	3,20	0,77	7,92	3,96	4,68
Real Estat	2,54	2,16	2,32	2,97	2,50	2,94	3,71	3,95	3,71	3,58	3,54
Jasa Perusahaan	9,63	7,96	7,93	8,08	8,38	9,27	9,31	9,94	7,90	9,10	4,91
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	18,89	2,90	3,96	1,16	6,43	4,79	4,70	4,33	1,63	3,86	6,45
Jasa Pendidikan	7,43	2,46	2,58	2,95	3,76	5,04	1,40	10,59	3,43	4,99	5,18
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,65	8,59	7,67	5,20	8,13	5,78	3,80	6,83	5,95	5,59	7,62
Jasa lainnya	8,92	8,85	9,95	11,36	9,80	9,84	11,31	9,92	8,71	9,93	9,91
PDB	5,11	5,05	4,95	5,02	5,03	4,87	5,12	5,04	5,39	5,11	5,61

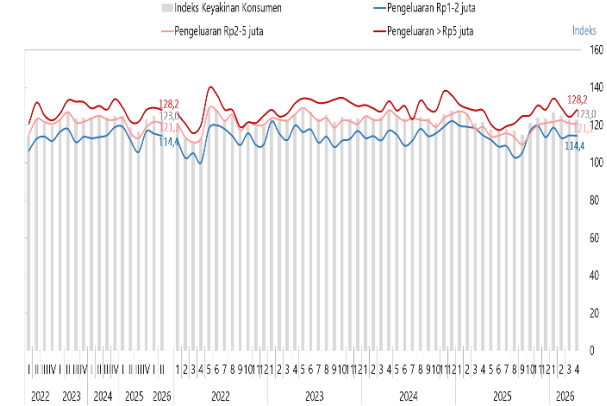
Sumber: BPS

Pertumbuhan Ekonomi Regional Triwulan I 2026



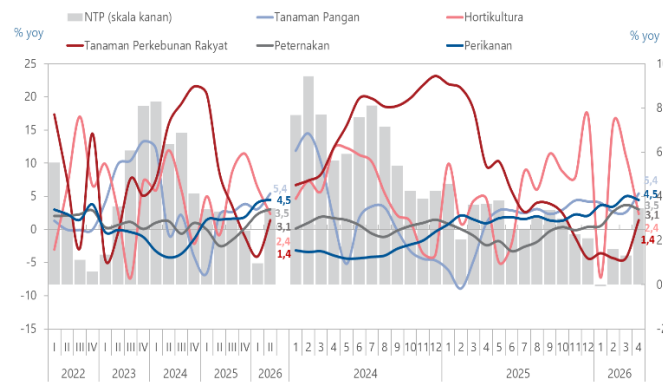
Sumber: BPS, diolah

Indeks Keyakinan Konsumen



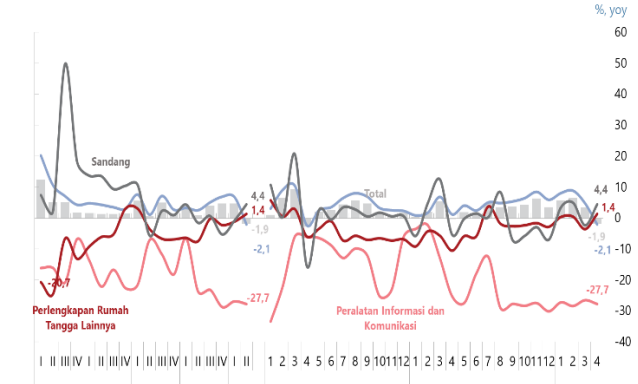
Sumber: Bank Indonesia. *Data s.d April 2026

Nilai Tukar Petani



Sumber: BPS, diolah. *Data s.d April 2026

Penjualan Eceran



Sumber: Bank Indonesia. *Data s.d April 2026

Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

RINCIAN	2022		2023		2024		2025		2026		
	APBN (Rp. Triliun)	REVISI 30/12/2022 (Rp. Triliun)	Realisasi s.d. Desember 2022 (Rp. Triliun)	Realisasi s.d. Desember 2023 (Rp. Triliun)	APBN (Rp. Triliun)	Realisasi s.d. Desember 2024 (Rp. Triliun)	APBN (Rp. Triliun)	Realisasi s.d. Desember 2025 (Rp. Triliun)	APBN (Rp. Triliun)	Realisasi s.d. Maret 2026 (Rp. Triliun)	
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1,846.1	2,266.2	2,635.4	2,463.0	2,774.3	2,463.0	2,842.5	3,005.1	2,756.3	3,153.6	574.9
I. Penerimaan Dalam Negeri	1,845.6	2,265.6	2,629.7	2,462.6	2,761.3	2,462.6	2,812.2	3,004.5	2,752.0	3,152.9	574.8
1. Penerimaan Perpajakan	1,510.0	1,784.0	2,034.6	2,021.2	2,155.4	2,021.2	2,232.6	2,490.9	2,217.9	2,693.7	462.7
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	335.6	481.6	595.2	441.4	605.9	441.4	579.5	513.6	534.1	459.2	112.1
II. Hibah	0.6	0.6	5.6	0.4	13.0	0.4	30.3	0.6	4.3	0.7	0.1
B. Belanja Negara	2,714.2	3,106.4	3,095.5	3,061.2	3,112.9	3,061.2	3,359.3	3,621.3	3,451.4	3,842.7	815.0
I. Belanja Pemerintah Pusat	1,944.5	2,301.6	2,279.2	2,246.5	2,240.6	2,246.5	2,486.8	2,701.4	2,602.3	3,149.7	610.3
1. Belanja Pegawai	426.5	426.5	402.4	442.6	412.3	442.6	464.5	521.5	501.1	580.7	161.7
2. Belanja Barang	339.7	339.7	426.0	387.0	429.8	387.0	493.3	486.9	546.9	714.1	111.2
3. Belanja Modal	199.2	199.2	240.4	199.1	307.3	199.1	328.1	234.1	427.5	279.1	35.4
4. Pembayaran Kewajiban Utang	405.9	405.9	386.3	441.4	439.9	441.4	488.4	552.9	514.4	599.4	144.3
5. Subsidi	207.0	283.7	252.8	298.5	269.6	298.5	291.9	307.9	281.6	318.9	52.2
6. Bantuan Hibah	4.8	4.8	5.8	0.0	0.2	0.0	0.14	0.2	0.3	0.4	-
7. Bantuan Sosial	147.4	147.4	161.5	148.6	157.6	148.6	153.1	140.1	186.6	167.4	37.5
8. Belanja Lainnya	214.0	494.4	403.9	329.3	224.6	329.3	267.3	458.0	143.9	489.8	67.9
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	769.6	804.8	816.2	814.7	881.3	814.7	863.5	919.9	849.0	693.0	204.8
1. Transfer ke Daerah	701.6	736.8	748.3	744.7	811.4	744.7	792.6	848.9	589.9	632.4	200.9
2. Dana Desa	68.0	68.0	67.9	70.0	69.9	70.0	70.9	71.0	55.0	60.6	3.8
C. Keseimbangan Primer	(462.2)	(434.4)	(46.4)	(156.8)	92.2	(156.8)	(19.4)	(63.3)	(180.7)	(89.7)	(95.8)
D. Surplus/Defisit Anggaran	(868.0)	(840.2)	(460.1)	(598.2)	(347.6)	(598.2)	(507.8)	(616.2)	(695.1)	(689.1)	(240.1)
Surplus/Defisit Anggaran (NPD)	(4.9)	(4.5)	(2.3)	(2.8)	(1.65)	(2.8)	(2.29)	(2.5)	(2.92)	(2.7)	(0.9)

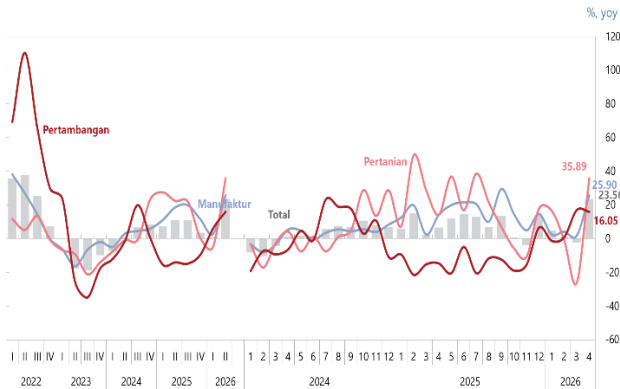
Sumber: Kementerian Keuangan

PMI Manufaktur



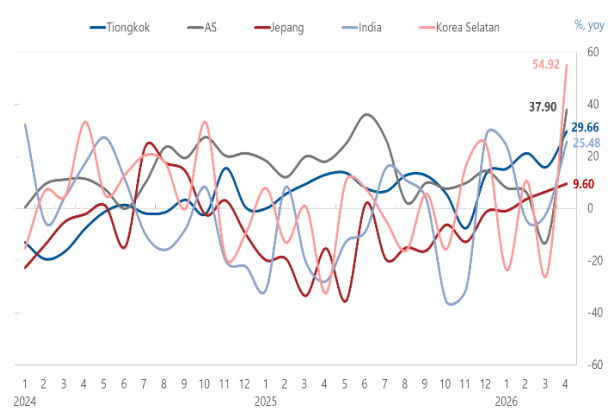
Sumber: Markit Economics

Ekspor Nonmigas



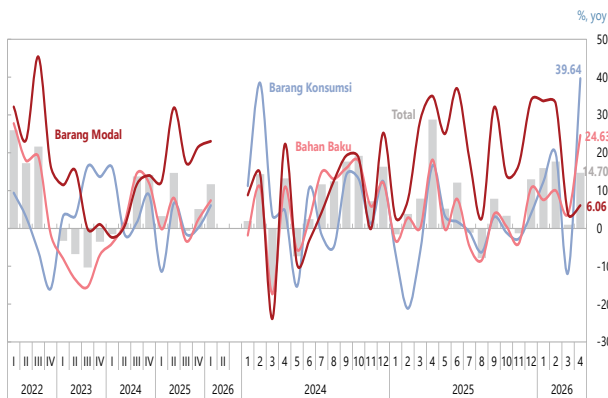
Sumber: Kementerian Keuangan, diolah Bank Indonesia.
*Data s.d April 2026

Ekspor Nonmigas ke Negara Tujuan Utama



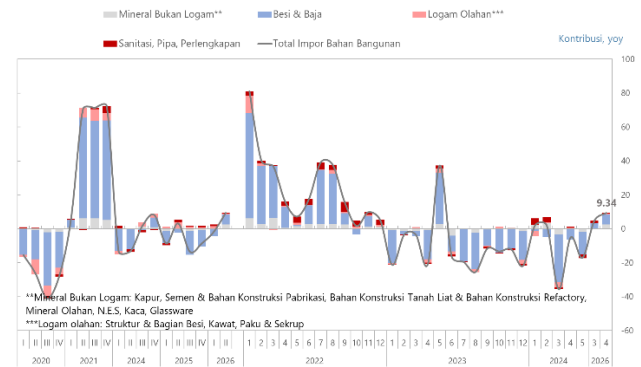
Sumber: Kementerian Keuangan, diolah Bank Indonesia

Impor Nonmigas



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah Bank Indonesia.
*Data s.d April 2026

Impor Barang Konstruksi



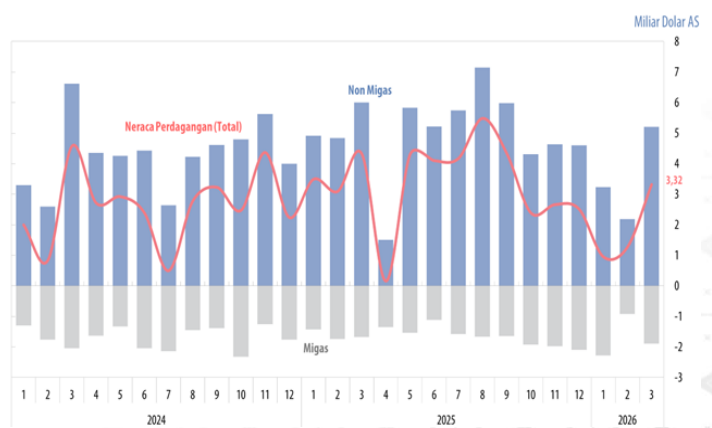
Sumber: Kementerian Keuangan, diolah Bank Indonesia.
*Data s.d April 2026

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) perlu terus diperkuat di tengah memburuknya perekonomian dan pasar keuangan global. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan berbagai instrumen untuk menghadapi memburuknya gejala global, di tengah tingginya permintaan musiman valas domestik.

Neraca Pembayaran Indonesia

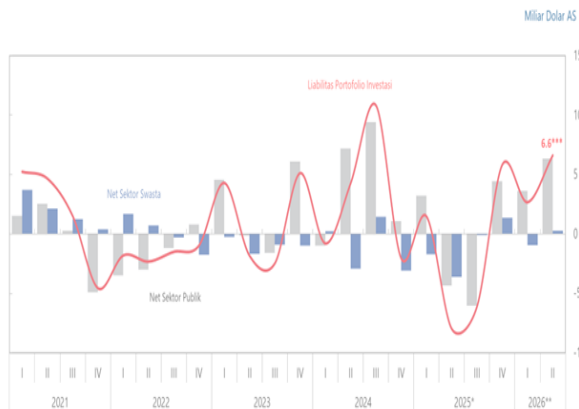
Komponen (Miliar Dolar AS)	2022				2023				2024				2025*							
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I**	II**	III**	IV**	Total
Transaksi Berjalan	0,7	4,3	4,7	3,5	13,2	2,9	-2,3	-1,3	-1,4	-2,0	-2,4	-3,0	-2,0	-1,1	-8,6	-0,2	-2,8	4,0	-2,5	-1,5
A. Barang	11,3	16,8	17,6	17,0	62,7	14,8	10,0	10,2	11,4	46,3	9,3	10,0	9,2	11,3	39,8	13,0	10,6	16,1	10,2	49,8
- Ekspor, fob	66,8	75,2	77,8	72,8	292,5	66,8	61,6	63,5	65,9	257,7	61,9	62,3	67,5	71,3	263,1	65,9	68,0	73,9	72,6	280,4
- Impor, fob	-55,5	-58,4	-60,2	-55,8	-229,9	-52,1	-51,6	-53,3	-54,5	-211,4	-52,6	-52,3	-58,3	-60,0	-223,3	-52,9	-57,4	-57,8	-62,4	-230,6
a. Non-migas	17,2	24,4	25,2	23,0	89,8	19,0	15,2	16,0	17,7	67,8	15,1	15,2	14,7	17,8	62,8	18,8	15,7	20,9	16,4	71,8
b. Migas	-5,7	-7,2	-6,5	-5,4	-24,8	-3,9	-4,7	-5,4	-5,9	-19,9	-5,5	-4,6	-4,4	-5,1	-19,6	-4,7	-4,2	-4,9	-5,7	-19,5
B. Jasa-jasa	-4,3	-3,0	-5,3	-5,4	-20,0	-4,5	-4,5	-3,9	-4,8	-17,7	-4,2	-5,0	-4,2	-5,1	-18,5	-5,4	-5,2	-4,4	-4,9	-19,8
C. Pendapatan Primer	-7,7	-9,0	-8,9	-9,6	-35,3	-8,8	-9,2	-8,8	-9,3	-36,0	-8,8	-9,5	-8,6	-9,0	-35,8	-9,4	-9,8	-9,4	-9,6	-38,2
D. Pendapatan Sekunder	1,5	1,5	1,3	1,6	5,8	1,4	1,4	1,3	1,3	5,4	1,3	1,4	1,5	1,6	5,9	1,6	1,7	1,7	1,8	6,7
Transaksi Modal dan Finansial	-2,0	-1,7	-5,6	0,6	-8,7	4,0	-4,4	-0,5	10,8	9,9	-2,4	2,6	8,1	9,6	18,0	-0,4	-4,2	-8,0	8,3	-4,2
1. Investasi Langsung	4,6	6,6	3,4	3,4	18,1	4,4	3,9	2,7	3,4	14,4	4,8	2,4	5,1	3,6	15,9	2,8	3,9	4,6	2,8	14,1
2. Investasi Portofolio	-3,2	-3,6	-3,1	-1,7	-11,6	3,0	-2,6	-3,0	4,9	2,2	2,1	3,1	9,8	-2,5	8,2	1,0	-8,1	-7,1	4,6	-9,4
3. Investasi Lainnya	-3,5	-4,7	-5,9	-1,5	-15,6	-3,4	-5,7	-0,2	2,4	-6,8	-5,1	-2,9	-6,9	8,4	-6,4	-4,2	-0,1	-5,6	0,7	-9,2
Neraca Keseluruhan	-1,8	2,4	-1,3	4,7	4,0	6,5	-7,4	-1,5	8,6	6,3	-6,0	-0,6	5,9	7,9	7,2	-0,8	-6,7	-6,4	6,1	-7,8
Memorandum:																				
- Cadangan Devisa	138,1	136,4	130,8	137,2	137,2	145,2	137,5	134,9	146,4	146,4	140,2	149,9	155,7	155,7	157,1	152,6	148,7	156,5	156,5	
- Dalam bulan impor dan pembayaran ULN Pemerintah	7,0	6,4	5,7	5,9	5,9	6,2	6,0	6,0	6,5	6,5	6,2	6,1	6,4	6,5	6,5	6,5	6,2	6,0	6,2	6,2
- Transaksi Berjalan (% PDB)	0,2	1,3	1,4	1,1	1,0	0,9	-0,7	-0,4	-0,4	-0,2	-0,9	-0,6	-0,3	-0,6	-0,1	-0,8	-1,1	-0,7	-0,1	

Neraca Perdagangan



Sumber: Bank Indonesia. *Angka sementara; **Angka sangat sementara

Aliran Modal Asing



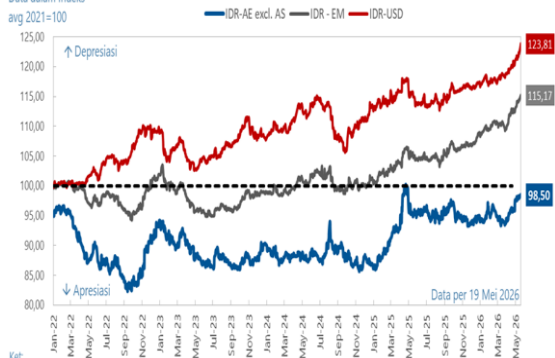
Sumber: Bank Indonesia. Data s.d. 18 Mei 2026 *Angka sementara **Angka sangat sementara ***termasuk penerbitan Global Bonds sebesar 1,1 miliar dolar AS

Indeks Rupiah terhadap USD, Negara Maju kecuali AS, dan Negara Berkembang

Indeks IDR thd USD, AE excl. AS, dan EM

Data dalam Indeks

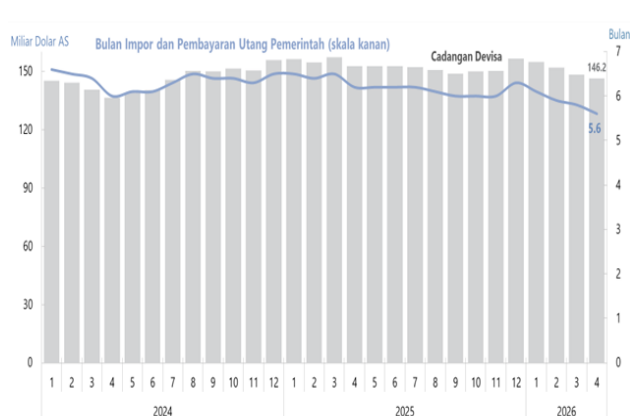
avg 2021=100



Sumber: Bloomberg. Data s.d. 19 Mei 2026

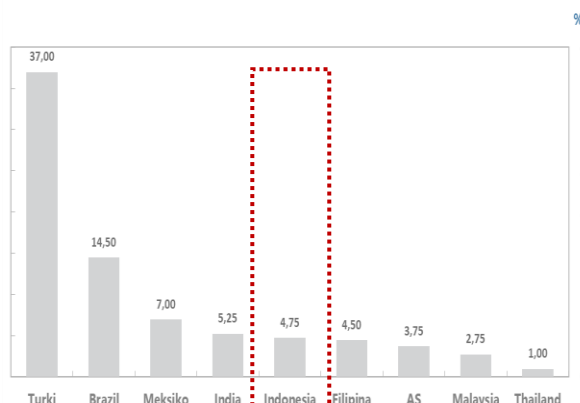
Sumber: BPS

Cadangan Devisa



Sumber: Bank Indonesia

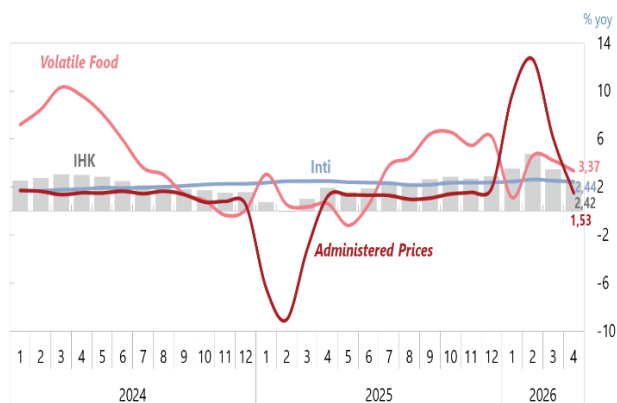
Suku Bunga Kebijakan Negara Kawasan



Sumber: Bloomberg. Data s.d. 19 Mei 2026

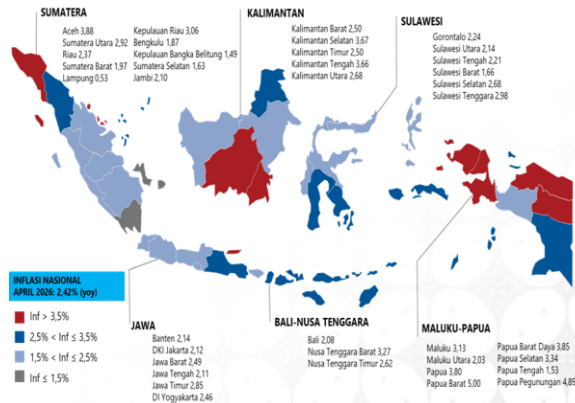
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) terjaga rendah dan ke depan perlu terus dikendalikan dari dampak memburuknya gejala global agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027.

Inflasi IHK dan Komponen



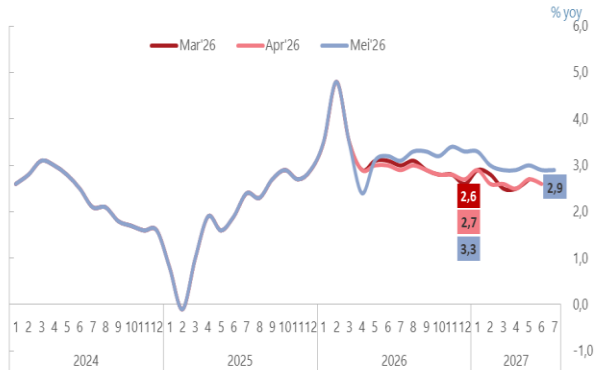
Sumber: BPS

Inflasi IHK Provinsi



Sumber: BPS

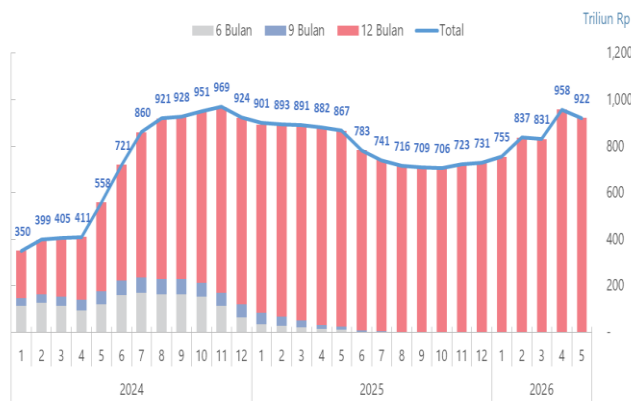
Ekspektasi Inflasi



Sumber: Consensus Economics

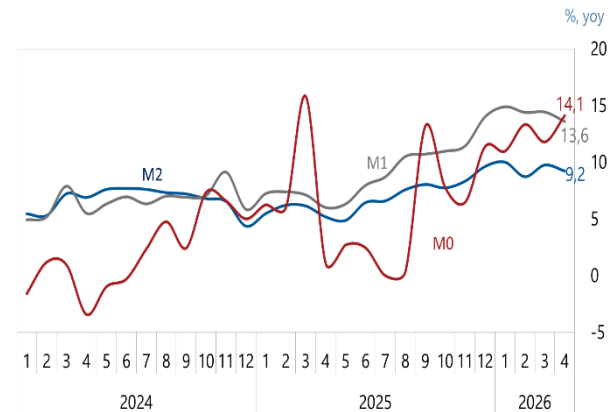
Penguatan kebijakan moneter Bank Indonesia terus ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, terkendalinya inflasi dalam sasaran, dan memperkuat stabilitas perekonomian. Jumlah uang beredar tumbuh lebih tinggi sejalan dengan kebijakan ekspansi likuiditas moneter yang ditempuh Bank Indonesia.

Perkembangan SRBI



Sumber: Bank Indonesia. Data s.d. 18 Mei 2026

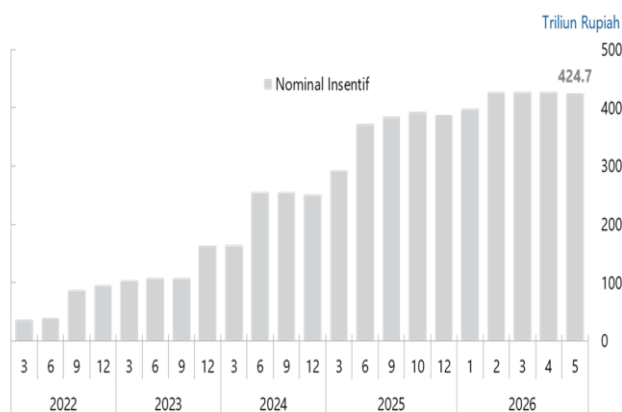
Likuiditas Perekonomian



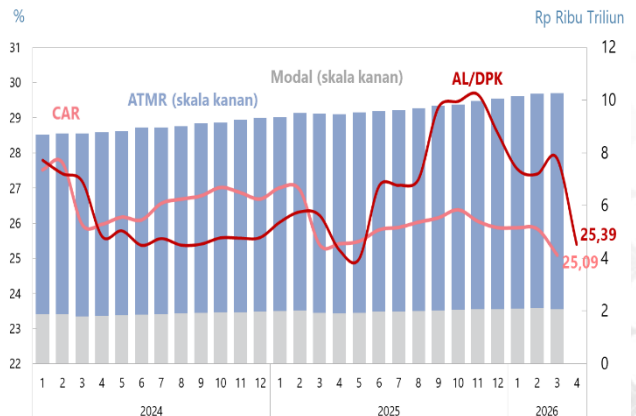
Sumber: Bank Indonesia

Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas. Peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu terus diperkuat. Ketahanan perbankan tetap kuat untuk memitigasi risiko dampak dari perang di Timur Tengah.

Perkembangan KLM



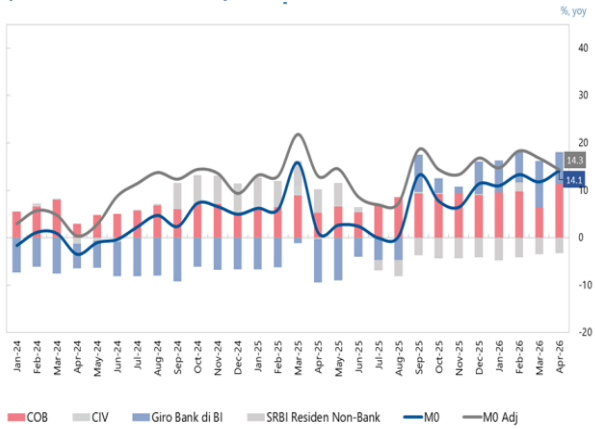
Perkembangan Permodalan dan AL/DPK Perbankan



Sumber: Bank Indonesia

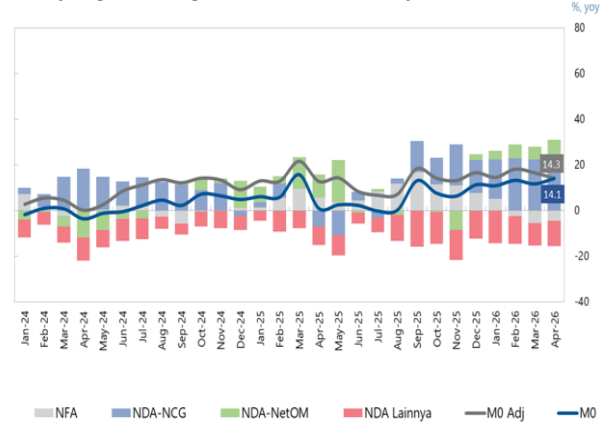
Sumber: Bank Indonesia

Komponen M0 dan M0 Adjusted



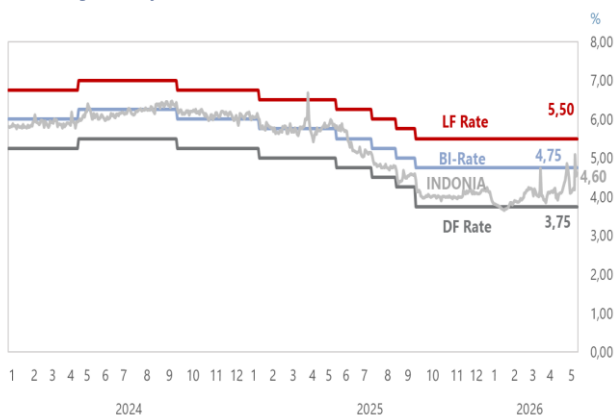
Sumber: Bank Indonesia

Faktor yang Memengaruhi M0 dan M0 Adjusted



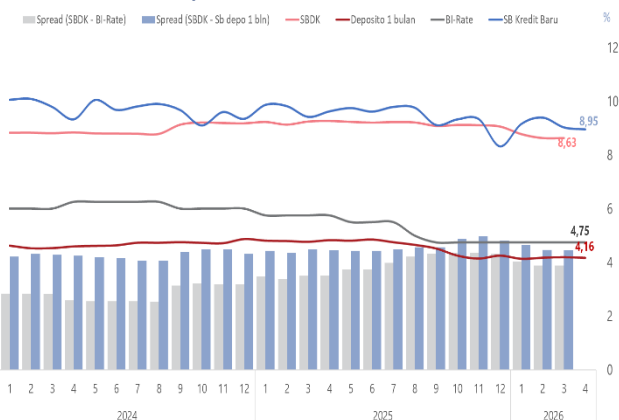
Sumber: Bank Indonesia

Suku Bunga Kebijakan Bank Indonesia dan INDONIA



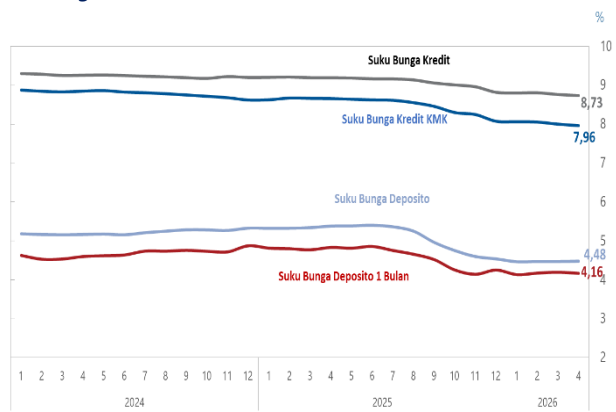
Sumber: Bank Indonesia

Transmisi BI-Rate kepada SBDK



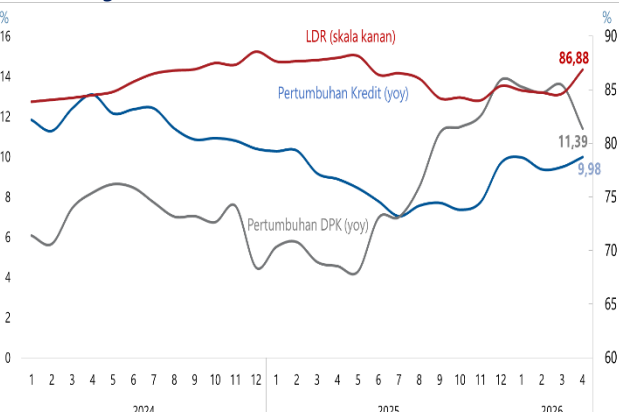
Sumber: OJK, Bank Indonesia, diolah

Suku Bunga Perbankan



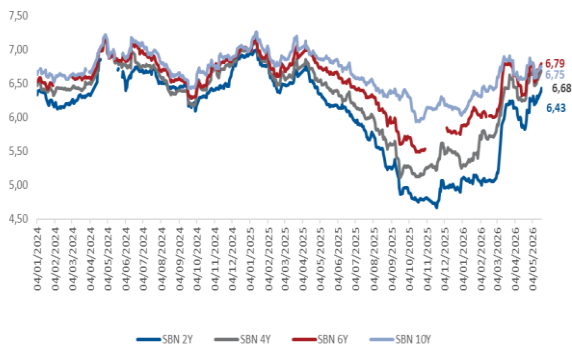
Sumber: Bank Indonesia

Perkembangan Kredit dan DPK



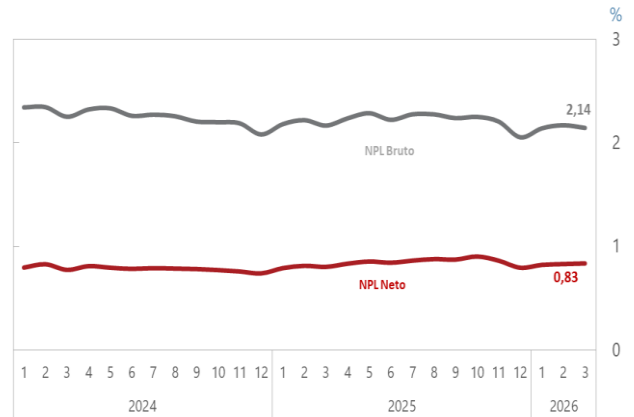
Sumber: Bank Indonesia

Yield SBN



Sumber: Bloomberg. Data s.d. 19 Mei 2026

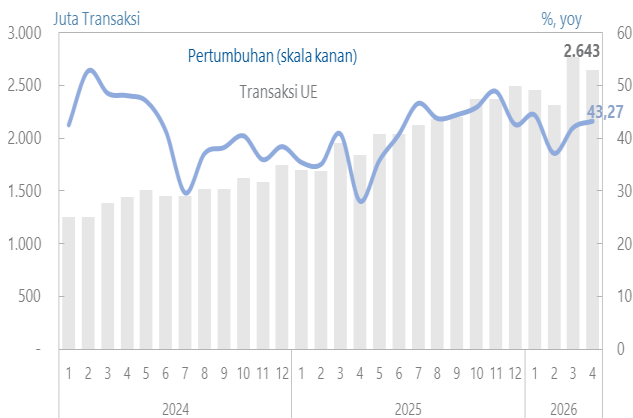
Rasio Kredit Bermasalah (NPL)



Sumber: Bank Indonesia, OJK

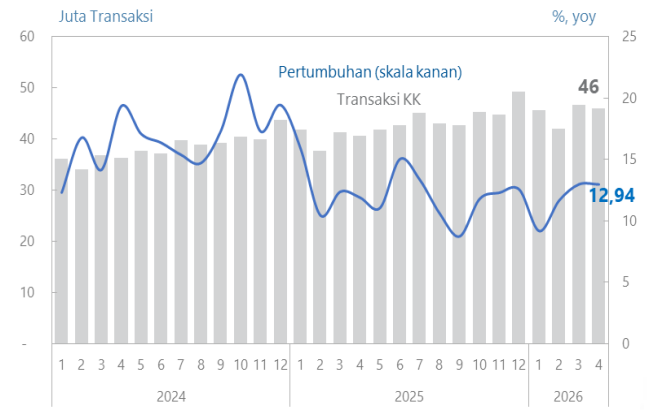
Pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada April 2026 tetap tinggi didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat.

Volume Transaksi Uang Elektronik



Sumber: Bank Indonesia

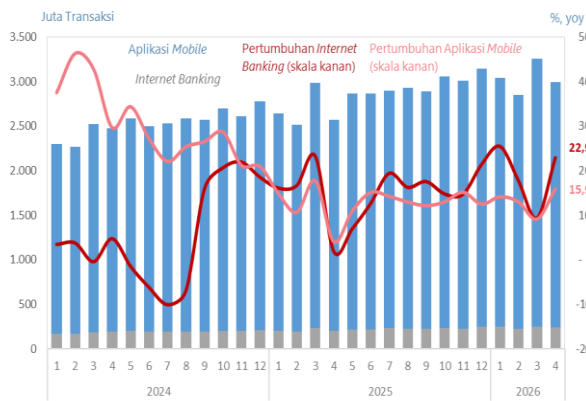
Volume Transaksi Kartu Kredit



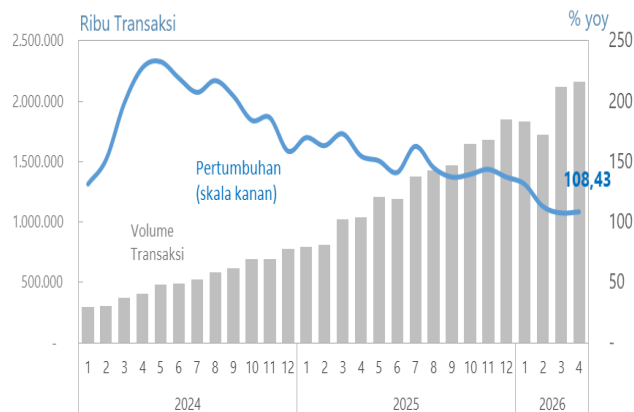
Sumber: Bank Indonesia

Volume Transaksi Digital Banking

Volume Transaksi QRIS

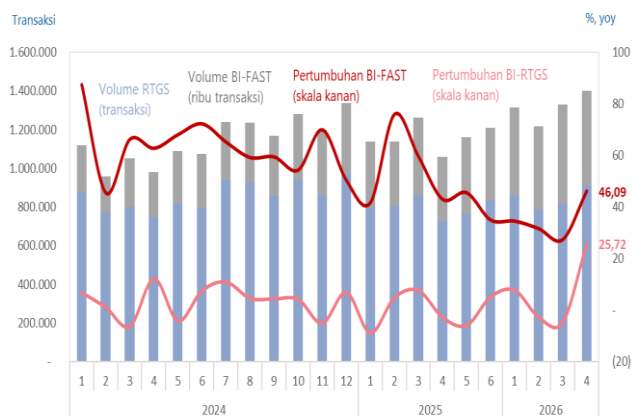


Sumber: Bank Indonesia



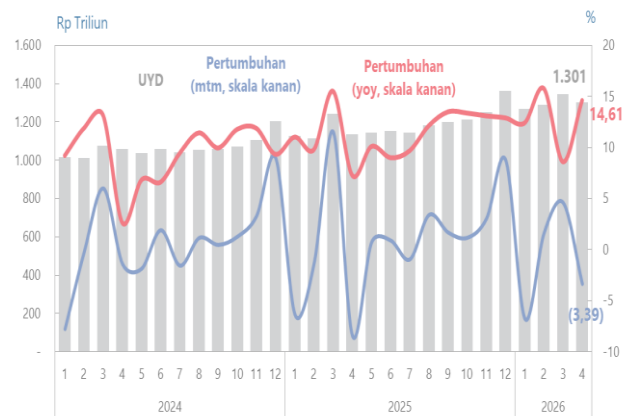
Sumber: Bank Indonesia

Volume Transaksi BI-FAST dan BI-RTGS

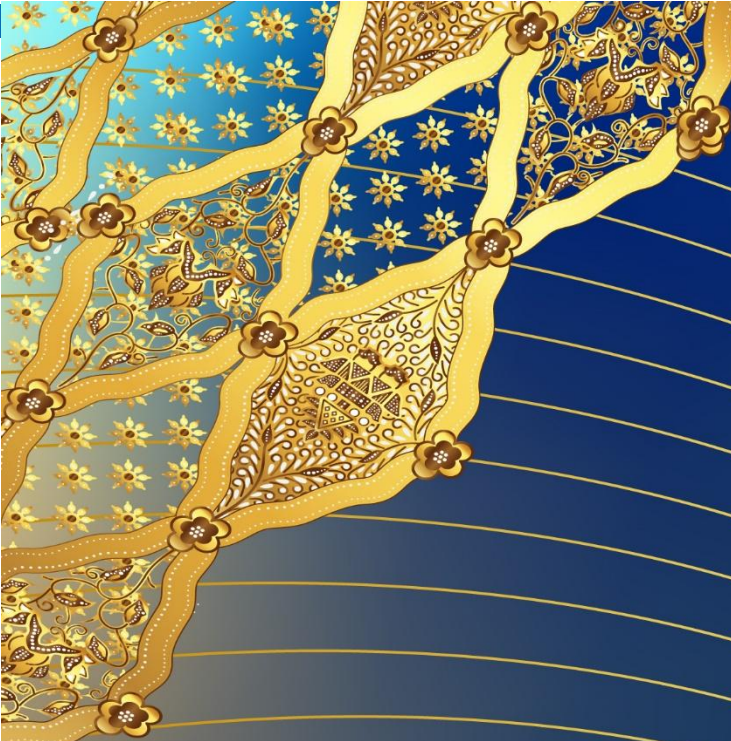


Sumber: Bank Indonesia

Uang Kartal yang Diedarkan



Sumber: Bank Indonesia



Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Kelompok Komunikasi Kebijakan dan Pengaturan

Grup Perumusan Kebijakan

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter

Telp : Contact Center BICARA (+62 21) 131

Email : DKEM-KKP@bi.go.id

Website : <https://www.bi.go.id>